

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
4.1. Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP	95
DAFTAR GAMBAR	
1.1. Communication Contitutes Organization Robert Mc Phee dan Pamela Zaug	27
2.1. Kerangka Berfikir	36
4.1. Pemberitaan Hasil Pemilihan Ketua DKPP	68
4.2. Pemberitaan PAW Anggota DKPP.....	69
4.3. Pemberitaan PAW Anggota DKPP dari unsur Bawaslu.....	70
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.1.1. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
1.1.2. Identifikasi Masalah	7
1.1.3. Rumusan Masalah	8
1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.2.1. Maksud Penelitian	9

1.2.2. Tujuan Penelitian	9
1.3. Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Manfaat Akademik.....	9
1.3.2. Manfaat Praktis	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.1.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teoritis	24
2.2.1. Komunikasi.....	24
2.2.2. Komunikasi Organisasi.....	25
2.2.3. Informasi Organisasi.....	26
2.2.4. <i>Communication Constitutes Organization (CCO)</i>	27
2.2.5. Demokrasi Sebagai Sistem Politik.....	31
2.2.6. Pemilihan Umum (Pemilu).....	33
2.2.7. Penyelenggara Pemilu.....	34
2.2.8. Integritas	34
2.3. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Objek Penelitian.....	37
3.2. Paradigma Penelitian	37
3.3. Metode Penelitian	38
3.4. Key Informan	40
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	42

3.5.1. Data Primer.....	42
3.5.2. Data Sekunder	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan DKPP	46
4.1.2. Profil Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	47
4.1.3. Tugas dan Wewenang DKPP	50
4.1.4. Kedudukan DKPP	51
4.1.5. Struktur DKPP	53
4.1.6. Kode Etik Penyelenggara Pemilu	55
4.1.7. DKPP Peradilan Kode Etik Terbuka.....	56
4.2. Hasil Penelitian.....	57
4.2.1. Proses Informasi DKPP Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 DKPP tentang Penyelenggaraan Pemilu	58
4.2.1.1. Memaknai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Sebagai <i>Enactment</i> Informasi	58
4.2.1.2. Penyusunan Peraturan DKPP Sebagai Seleksi Informasi.....	60
4.2.1.3. Sidang DKPP Sebagai Retensi Informasi.....	64
4.2.2. <i>Communication Constitutes Organizing</i> DKPP	65

4.2.2.1.	Membentuk <i>Membership Negotiation</i> DKPP.....	66
4.2.2.2.	Penyusunan Sekretariat Sebagai <i>Self Structuring</i> DKPP.....	72
4.2.2.3.	<i>Institutional Position</i> DKPP Dalam Tripartit Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Penegak Etika	76
4.2.2.4.	<i>Action Coordination</i> Anggota DKPP.....	82
4.3.	Pembahasan	85
4.3.1.	Penyelenggara Pemilu Berintegritas Perspektif DKPP.....	86
4.3.2.	Rapat Pleno Anggota DKPP	88
4.3.3.	Pengorganisasian Lembaga Penegak Kode Etik	89
4.3.3.1.	Formasi dan Pembagian Peran Anggota DKPP Periode 2012-2017.....	89
4.3.3.2.	Penataan Struktur Kelembagaan DKPP.....	93
4.3.3.3.	Tripartit Lembaga Penyelenggara Pemilu	95
4.3.3.4.	Pembagian Kerja Anggota DKPP.....	98
BAB IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1.	Kesimpulan	100
5.2.	Saran	101
5.2.1.	Saran Akademis	101
5.2.2.	Saran Praktis	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		